**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latara Belakang Masalah**

Arus lalu lintas dana jangka panjang maupun jangka pendek antar negara yang semakin dipermudah oleh globalisasi menjadi salah satu penyebab rentannya stabilitas sistem keuangan internasional, dimana hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap stabilitas sistem keuangan setiap negara yang menjadi aktor dalam ekonomi politik internasional. Nilai mata uang yang fluktuatif akan berpengaruh langsung terhadap aktivitas para investor, spekulan, atau siapapun aktor yang bermain di pasar keuangan. Sementara itu, aktivitas di pasar keuangan tentunya berpengaruh terhadap sektor riil sehingga penurunan yang terjadi di sektor keuangan akan langsung berdampak pada aktivitas ekonomi sehari-hari.[[1]](#footnote-1)

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, setiap negara membentuk bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui nilai tukar dan stabilitas harga, maka itu bank sentral dimiliki oleh setiap negara.[[2]](#footnote-2) Bank sentral memonitor data ekonomi dan menyesuaikan suplai uang dengan tingkat bunga untuk menjaga agar ekonomi tetap berada di arah yang benar. Bila terjadi kepanikan finansial atau krisis, bank sentral juga memegang fungsi sebagai *lender of last resort,* yaitu memberikan pinjaman uang terutama

pada bank-bank yang bankrut untuk mengembalikan atau menjaga stabilitas moneter.[[3]](#footnote-3) Maka, sebagai institusi yang memegang tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, peran bank sentral menjadi sangat krusial.

 Negara-negara di Eropa memiliki kasus yang unik terkait bank sentral, negara-negara di Eropa menerapkan mata uang tunggal yaitu Euro yang di adopsi oleh 18 negara di Eropa, yang disebut dengan *Euro-zone,* maka Euro memiliki bank sentral yang berada di bawah *European Union* (EU) bernama *European Central Bank (ECB).* ECB bertugas untuk menjaga stabilitas Euro di kawasan Euro-zone dengan mengambil kebijakan moneter yang akan diterapkan oleh negara-negara anggota *Euro-zone.[[4]](#footnote-4)*

ECB berdiri secara resmi pada tanggal 1 januari 1999, yang menandakan penyatuan moneter antar wilayah yang tergabung dalam EMU atau *European Monetary Union*. Dan ECB lah yang menjadi otoritas moneter teringgi dalam kawasan negara pengguna mata uang Euro *(Euro-zone)*. Hal ini menjadi tanggung jawab yang besar terhadap ECB, karena ekonomi kawasan Euro ini merupakan ekonomi terbesar kedua setelah ekonomi Amerika Serikat. Hal ini menandakan bahwa harus ada keseriusan dalam mengelola mata uang yang tergabung dalam kelompok negara tersebut. Sehingga diperlukan berbagai aturan dalam keanggotaan ECB, aturan ini merupakan tindak lanjut dari persyaratan pada saat pembentukan OCA. Sebelum menjadi anggota dari ECB maka harus memenuhi persyaratan dalam keanggotaan dari ECB. Sebelum persyaratan itu terpenuhi maka negara tersebut harus menunggu sampai dia bisa memenuhinya, walaupun dia termasuk dalam kawasan Eropa. Sampai sekarang ini keanggotaan dari Euro-zone berjumlah 18 negara, sebelumnya pada tahun 2001 hanya 11 negara yang terakhir masuk adalah negara Yunani. Yunani baru dapat memenuhi kriteria ECB pada tahun 2000, tetapi mengikuti periode keuangan dari ECB maka baru terdaftar pada 1 januari 2001. Kemudian diikuti oleh Slovenia pada 2007, Cyprus dan Malta pada tahun 2008, kemudian Slovakia pada tahun 2009, Estonia pada tanggal 1 januari 2011. Kemudian Latvia pada 1 Januari 2014. Yang terakhir adalah Lithuania pada 1 Januari 2015.[[5]](#footnote-5)

Kebijakan tunggal terkait dengan mata uang Euro menjadi tanggung jawab *European Central Bank* (ECB), dimana ECB memang dibentuk untuk tujuan itu bersama dengan bank sentral negara-negara yang telah mengadopsi Euro. Kebijakan fiskal tetap berada di tangan masing-masing negara anggota EMU, walaupun mereka telah sepakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pada keuangan publik, dimana aturan itu dikenal dengan pakta stabilitas dan pertumbuhan. Negara-negara anggota juga mempertahankan tanggung jawab keseluruhan untuk kebijakan struktural mereka (yaitu pasar tenaga kerja, pensiun dan pasar modal), tapi setuju untuk mengkoordinasikan mereka untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama.

Pengambil kebijakan terkait dengan Euro, dengan kata lain terkait dengan EMU adalah ECB, Euro adalah mata uang dari sekitar 330 juta orang yang tinggal di 18 negara kawasan Euro. Hal ini juga digunakan, baik secara formal sebagai *legal tender* atau untuk tujuan praktis, oleh negara-negara lain seperti tetangga dekat dan mantan koloni. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa Euro telah dengan cepat menjadi mata uang internasional yang paling penting kedua setelah dolar.

Persatuan Ekonomi dan Moneter (*Economic and Monetary Union atau EMU*)[[6]](#footnote-6) adalah istilah payung untuk sekumpulan kebijakan yang bertujuan mengubah ekonomi anggota-anggota Uni Eropa dalam tiga tahap agar mereka bisa mengadopsi satu mata uang tunggal, yaitu Euro. Istilah ini sering dianggap sama dengan zona Euro

Berdasarka fase *Maastricht* sampai Euro dan *Euro Area* (Tahun 1991-2002). *The Delors Reports* mengusulkan masa persiapan tiga tahap untuk penyatuan ekonomi dan moneter kawasan Euro, yang mencakup periode 1990-1999, persiapan yang dimaksud terdiri dari beberapa tahap yakni *pertama* menyelesaikan pasar internal (1990-1994) yakni melalui pengenalan pergerakan bebas modal. *Kedua* mempersiapkan Bank Sentral Eropa (ECB) dan Sistem Bank Sentral Eropa (ESCB), dan mencapai konvergensi ekonomi (1994-1999). Dan terakhir memperbaiki nilai tukar dan meluncurkan Euro (1999 dan seterusnya).

Pemimpin Eropa menerima rekomendasi dari *Delors Reports*, yakni perjanjian baru pada Uni Eropa yang berisi ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan EMU yang selanjutnya disepakati di Dewan Eropa di Maastricht Belanda pada bulan Desember 1991. Dewan ini juga akhirnya menyepakati *Maastricht Convergen Criteria* yang menyatakan bahwa setiap anggota harus bertemu untuk berpartisipasi dalam kawasan Euro.

Akhirnya, setelah satu dekade persipan, akhirnya Euro diluncukan pada tanggal 1 Januari 1999. Pada saat yang sama pula, kebijakan dan operasi moneter Eropa dilimpahkan kepada Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*) yang didirikan beberapa bulan sebelum Euro diluncurkan yakni pada tanggal 1 Juni 1998 bersamaan dengan persiapan untuk tahap ketiga dari EMU. Setelah tiga tahun bekerja dengan Euro sebagai uang buku (*Non-Tunai*) bersama mata uang nasional, koin dan uang kertas Euro yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2002 merupakan penggantian uang tunai terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah.

Semua negara anggota Uni Eropa diharapkan berpartisipasi dalam EMU. Kriteria Kopenhagen adalah serangkaian persyaratan masuk bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan UE. Kriteria tersebut berisikan persyaratan yang perlu dipenuhi dan kerangka kerja waktu yang perlu diselesaikan agar sebuah negara bisa bergabung dengan persatuan moneter ini. Elemen terpenting dari kriteria ini adalah Mekanisme Nilai Tukar Eropa (ERM II) , ketika mata uang kandidat mendemonstrasikan pergeseran ekonomi dengan mempertahankan deviasi terbatas dari nilai target mereka melawan Euro.

Menurut kesepakatan, negara Eropa akan membentuk Uni Moneter Eropa (*European Monetary Union atau EMU*) secara penuh, yang mempunyai satu bank sentral yang akan menerbitkan mata uang bersama pada tahun 1999 (disebut mata uang Euro). Kesepakatan tersebut mengharuskan integrasi dan koordinasi dalam kebijakan moneter dan fiskal negara anggotanya. Sebelum menjadi anggota, negara Eropa harus memenuhi standar sebagai berikut ini :

1. Inflasi nominal tidak boleh lebih dari 1,5% diatas rata-rata tiga anggota dengan inflasi paling kecil tiga tahun yang lalu.
2. Tingkatan bunga jangka panjang tidak boleh lebih dari 2% diatas rata-rata tiga anggota dengan tingkat bunga paling bawah.
3. Defisit tidak boleh lebih dari 3% dari GNP
4. Utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari GNP
5. Nilai tukar: Negara pendaftar harus menjalani mekanisme nilai tukar (ERM II) di bawah Sistem Moneter Eropa (EMS) selama dua tahun berturut-turut dan tidak boleh mendevaluasi mata uangnya selama periode tersebut[[7]](#footnote-7)

Semua negara anggota, kecuali Denmark dan Britania Raya, telah berkomitmen untuk bergabung dengan EMU. Delapan belas negara anggota Uni Eropa, termasuk Estonia, telah memasuki tahap ketiga dan mengadopsi Euro sebagai mata uangnya. Denmark dan Lithuania adalah peserta terbaru dalam mekanisme nilai tukar ini. Dari semua anggota pra-2004, Britania Raya dan Swedia tidak bergabung dengan ERM II dan Denmark masih tetap di ERM tanpa melanjutkan ke tahap ketiga. Lima negara lainnya (pasca-2004) harus mencapai pergeseran yang cukup untuk berpartisipasi. Sepuluh anggota UE ini masih menggunakan mata uangnya sendiri.[[8]](#footnote-8)

Namun sekarang, keadaan finansial di delapan belas negara pengguna Euro tidak dapat dikatakan berada dalam kondisi stabil. Eropa tengah berada dalam apa yang dinamakan dengan krisis *Euro-zone.* Sejak krisis utang Yunani muncul di tahun 2009, beberapa negara-negara Eropa yang juga memiliki tingkat utang yang tinggi juga mengalami krisis utang. Negara yang telah tercatat dalam krisis sekarang disingkat dalam akronim PIIGS; *Portugal, Ireland, Italy, Greek,* dan *Spain*. Selain negara-negara ini memiliki masalah-masalah domestik tersendiri yang menyebabkan kemunculan krisis di negaranya, beberapa ahli dan ekonom juga menganggap bahwa hal ini merupakan dampak dari *contagious effect* oleh krisis Yunani yang menyebar ke negara-negara tetangganya.

Peran ECB sebagai bank sentral di kawasan Euro-zone tentunya tidak lepas dari kemunculan krisis *Euro-zone*. Sejak munculnya pengakuan Yunani di tahun 2004 mengenai tingkat defisitnya yang selalu berada di atas 3%, ECB tetap membiarkan Yunani menjadi bagian dari Euro-zone. Konsekuensi logisnya adalah seharusnya ECB merancang kebijakan moneter yang dapat membantu penurunan defisit Yunani dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Yunani, tentunya diikuti dengan koordinasi kebijakan moneter terhadap kebijakan fiskal Yunani. Pasalnya, negara-negara yang terserang krisis ini tidak dapat membuat kebijakan moneter yang independen sebab adanya *common monetary policy* dalam Euro-zone yang berarti semua kebijakan moneter diputuskan oleh ECB. Namun kenyataannya yang muncul adalah krisis Yunani meruak pada tahun 2009 dan krisis Yunani tereskalasi menjadi krisis Euro-zone di tahun 2010. Melihat kenyataan ini, muncul pertanyaan mengenai peran ECB dalam pencegahan dan usaha meminimalisir krisis ini. Penelitian ini kemudian tertarik untuk melihat keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi ECB sebagai lebih dari sekedar institusi perbankan, melihat bahwa ECB menjadi wadah dari bertemunya kepentingan 18 negara dimana hal ini bukan merupakan hal yang mudah. Kemunculan krisis Euro-zone tentu tidak lepas dari peranan ECB sebagai lembaga yang memegang otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemunculan krisis ini seakan menyatakan bahwa ECB yang memegang fungsi bank sentral di kawasan *Euro-zone* tidak berhasil menjaga stabilitas finansial di kawasan *Euro-zone.*

Sebelum krisis Yunani terjadi, peran bank sentral atau ECB seharusnya dapat mencegah terjadinya krisis ini. ECB telah melakukan “kesalahan” dengan mengizinkan Yunani bergabung dengan *Euro-zone* saat kondisinya belum siap, maka seharusnya sejak terbongkarnya hal ini di tahun 2004, ECB dapat lebih berhati-hati sejak mengetahui kondisi ekonomi Yunani yang sesungguhnya. Selain itu, sejak krisis Yunani terjadi pada akhir tahun 2009, seharusnya ECB lebih awas dalam menjaga dan mengembalikan stabilitas *Euro-zone* agar krisis ini tidak meluas ke negara *Euro-zone* lainnya. Dengan jumlah utang negara yang tidak sedikit, ECB tentunya sadar bahwa Irlandia dan Portugal hanya dalam hitungan bulan saja dapat terserang krisis yang sama bila Yunani tidak segera diatasi. Hal inilah yang tidak tampak dalam pencegahan dan pengelolaan krisis Yunani, sehingga berdampak pada munculnya krisis *Euro-zone.* Hal ini mengherankan, sebab krisis finansial global masih mewarnai perekonomian dunia akibat adanya *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang berdampak pada sistem perekonomian global. Seharusnya berdasarkan pengalaman yang masih sangat segar ini, ECB sigap dalam menangani gejala-gejala terkait krisis terutama krisis yang terjadi akibat faktor endogen seperti krisis Yunani.

Keberadaan ECB merupakan hal utama yang menjadi titik berat atas kemunculan krisis *Euro-zone.* Tinjauan atas peran ECB sebagai bank sentral di kawasan *Euro-zone* telah banyak dilakukan melalui perspektif ekonomi. Hal ini dipaparkan dalam penelitian **Rainer Lenz** yang berjudul *Crisis in the Euro-zone:* *Financial Management Without Financial Policy[[9]](#footnote-9)* menekankan bahwa kebijakan IMF dan EU dalam menyelamatkan Yunani telah gagal, dimana kucuran dana sebesar 110 milyar Euro yang diberikan IMF dan EU sebagai *rescue package* tidak memperbaiki keadaan, ditandai dengan resesi yang semakin parah, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya tingkat pendapatan negara melalui pajak. Sementara itu Portugal yang menghadapi kebangkrutan juga diberikan dana sebesar 78 milyar Euro dan belum menampakkan hasil yang positif. **Lenz** mempertanyakan kebijakan kredit EU yang menurutnya memiliki tingkat suku bunga yang terlalu tinggi (5,9% dimana tingkat suku bunga di pasar adalah 3,2%) sehingga **Lenz** mempertanyakan, apakah tindakan penyelamatan ini merupakan bentuk dari maksimalisasi profit oleh bank atau tidak.

Kelemahan ECB dalam menjalankan perannya sebagai bank sentral juga dapat dilihat melalui perspektif politik yang terkait dengan fungsi pengawasan dan peran para aktor perumus kebijakan. Lemahnya fungsi pengawasan ECB dibahas dalam tulisan **Stergios Skaperdas** yang berjudul *Policymaking in the Euro-zone* *and the Core VS Peripheral Problem[[10]](#footnote-10),* Skaperdas menekankan beberapa kelemahan institusional ECB yang menjadi akar permasalahan dari eskalasi krisis Euro-zone. Keterbatasan otoritas ECB yang berdampak pada absennya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu kelemahan institusional ECB. Kelemahan lainnya adalah fragmentasi pengawasan dan absennya tanggung jawab terhadap perbankan. Menurur **Skaperdas**, ECB sangat kehilangan kontrol dalam mengawasi aktivitas perbankan (yang ternyata berbahaya). Hal ini dinilai sangat tidak bertanggung jawab untuk kawasan sekelas *Euro-zone* dengan arus lalu lintas dana yang bebas. Menerima kritik ini, ECB tidak merasa ada perubahan fundamental yang perlu dilakukan terkait masalah-masalah tersebut.

Atas dasar beberapa permasalahan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan kegagalan kebijakan ECB yang berdampak pada beberapa rentetan krisis yang terjadi di negara-negara yang berada dalam *Euro-zone* sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan UE.

Untuk itu maka penulis tertarik untuk meneliti masalah di atas dengan skripsi berjudul : **“KEGAGALAN EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB) 2004-2010 DALAM MENJAGA STABILITAS FINANSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP NEGARA-NEGARA EURO-ZONE”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi atau kedudukan ECB dikawasan Uni Eropa ?
2. Bagaimana dampak dari kegagalan kebijakan ECB terhadap negara-negara yang berada di *Euro-zone* ?

**1.3 Pembatasan Masalah**

Karena permasalahan di atas sangat luas dan kompleks maka penelitian ini dibatasi pada kegagalan ECB terhadap perekonomian negara yang berada di *Euro-zone.*

**1.4 Rumusan Masalah**

Atas dasar pembatasan masalah maka dirumuskan masalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh ECB dalam perekonomian di *Euro- zone*?

**1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.5.1 Tujuan**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang menjadi acuannya, yakni sebagai berikut :

1. Untuk megetahi bagaimana kedudukan ECB di kawasan Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kegagalan kebijakan ECB terhadap negara-negara yang berada di Euro zone.

**1.5.2 Kegunaan**

Adapun kegunaan diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberiakan informasi dan menjadikan bahan kajian para mahasiswa khususnya program studi Hubungan Internasional dan pemerhati masalah-masalah Internasional.
2. Memberikan kegunan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pembaca, terutama dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan moneter yang di buat oleh ECB tentang EMU , secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan, terutama kebijakan yang berhubungan dengan keuangan.

**1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1.6.1 Kerangka Teoritis**

Untuk memahami suatu permasalahan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian di atas, diperlukan adanya sebuah kerangka berfikir. Kerangka pemikiran ini terdiri dari teori dan konsep yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah.

Penulis memiliki pandangangan mengenai ECB sebagai sebuah Rezim Internasional, perspektif dalam melihat ECB sebagai rezim sendiri digunakan dalam penelitian ini sebab keberadaan ECB bukanlah suatu organisasi perbankan yang mengutamakan fungsi-fungsi teknis saja dalam operasinya, melainkan keberadaan ECB sebagai institusi perbankan dibawah EU dan bagian dari integrasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik para pemangku kebijakan di Eropa baik dalam pembentukannya hingga operasinya. Dalam penelitian ini penulis juga menyertakan beberapa teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan msalah yang akan di teliti.

ECB muncul sebagai institusi perbankan yang menempatkan diri dalam struktur internasional dengan perannya yang membawahi 18 negara Euro, dimana hal ini membuat ECB diwarnai dengan berbagai perilaku negara yang didasari berbagai kepentingan. Keunikan ECB membuat ECB tidak bisa dianalisis sebagai organisasi formal biasa.

Untuk mencapai tujuan tertentu-tujuan tertentu melalui kerjasama Internasional, maka negara-negara membentuk rezim internasional. **Stephen D. Krasner** mendefinisikan rezim internasional sebagai berikut :

**“rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan internasional.”[[11]](#footnote-11)**

Rezim dapat muncul dalam bentuk konvensi, perjanjian, persetujuan, dan institusi pada berbagai macam area baik ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Rezim muncul pada area yang menjadi kepentingan banyak negara.[[12]](#footnote-12) Rezim juga dapat berbentuk multilateral, regional, atau global. Setiap rezim memiliki penekanan yang berbeda tergantung apa yang ingin dicapai. Namun fungsi utama dari rezim internasional dalah untuk memfasilitasi perbuatan perjanjian yang saling menguntungkan antar negara.[[13]](#footnote-13)

Kemudian selanjutnya untuk menganalisis kebijakan moneter ECB penulis mencantumkan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "*margin requirement*", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor *riil*.[[14]](#footnote-14)

Kebijakan moneter seringkali disandingkan keberadaannya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan mengenai pengeluaran dan pembelanjaan pemerintah, baik alokasi maupun pendanannya, sehingga seringkali terkait juga dengan kebijakan pajak. Keduanya harus memiliki koordinasi yang seimbang sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sempurna. Misalnya, tingkat suku bunga harus disesuaikan dengan tingkat pajak sehingga terjadi keseimbangan antara uang yang berada di pemerintah dengan uang yang beredar di masyarakat.

Kemudian konsep sealnjutnya adalah konsep mengenai stabilitas finansial atau keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Di bawah ini dikutip beberapa definisi SSK yang diambil dari berbagai sumber:[[15]](#footnote-15)

” Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.”[[16]](#footnote-16)

” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.”[[17]](#footnote-17)

” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”[[18]](#footnote-18)

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Tori yang akan digunakan selanjutnya adalah teori integrasi. Menurut **Ernest B. Haas**, Integrasi Internasional adalah:

“**proses pencapaian kondisi supranasional dimana urusan yang semula ditangani pemerintah nasional beralih ke unit – unit politik yang lebih besar. Integrasi internasional secara singkat didefinisikan sebagai proses dimana aktor – aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat yang baru dan lebih besar, yang lembaga – lembaganya memiliki atau mengambil alih yuridiksi yang semula berada ditangan negara bangsa.”[[19]](#footnote-19)**

integrasi ekonomi dalam lingkup sebuah negara adalah gambaran penyatuan beberapa negara dalam satu ke satuan. Ini diawali dengan teori *Costum Union oleh* **Viner**. Tapi, batasan definisi yang baku mengenai integrasi ekonomi oleh para ekonom belum  ditemukan hingga saat ini. Para ekonom lebih mengembangkan definisi integrasi ekonomi dari berbagai *point of view* yang berbeda beda.

Kemudian teori yang dipakai selanjutnya adalah teori regionalisme, dalam mendefinisikan regionalisme, sering menimbulkan perdebatan dan pertikaian, hingga jarang menimbulkan konsensus. Hal ini dikarenakan perlunya pemahaman terlebih dahulu atas pengertian kawasan (*region*) dan regionalisme. Sekalipun kedekatan geografi itu sendiri tidak banyak membantu menjelaskan definisi *region*atau dinamika regionalisme, tetapi tidak bisa membantu regionalisme dari bentuk-bentuk organisasi yang “kurang lebih global”.

Menurut **Mansbaach**, *region* atau kawasan adalah:

 “Pengelompokan regional di identifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketegantungan ekonomi yang saling menguntungkan (Interdependensi), komunikasi serta keikut sertaan dalam organisasi internasianal”.

Sedangkan menurut **Joseph Nye**, yang dimaksud dengan region internasional adalah:

 **“kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa regionalisme merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region. Pemikiran Nye ini menunjukkan bahwa regionalisme dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan fisik, seperti letak geografis negara-negara anggotanya.”[[20]](#footnote-20)**

Kemudian teori yang dipakai selanjutnya adalah teori krisis, penggunaan teori ini penulis rasa tepat karena dampak yang ditimbulkan apabila sebuah negara gagal dalam menjaga stabilitas ekononomi sebuah rezim.

Krisis ekonomi merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau penurunan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia., bahkan dalam tahun ini perekonomian bukan tambah berkembang akan tetapi perekonomian dunia tambah merosot. Hal ini disebabkan kebutuhan pokok yang semakin mahal dan harga minyak dunia yang sempat memaksa berbagai sektor produksi ekonomi menaikkan ongkos produksinya dan tidak terkoreksi**.**

Dalam ekonomi, krisis adalah istilah lama dalam teori siklus bisnis, merujuk pada perubahan tajam menuju resesi. Sebagai contoh krisis ekonomi 1994 di Meksiko, krisis ekonomi Argentina (1999-2002), krisis ekonomi Amerika Selatan 2002, krisis ekonomi Kamerun. Krisis finansial bisa berupa krisis perbankan maupun krisis moneter.

Dimana krisis sendiri menurut **Three Distinc School**, yang memaparkan bahwa krisis memiliki karakteristik fundamentalis ;

**“Krisis fundamentalist dengan istilahnya yaitu rational panic, bahwa krisis tersebut ialah sesuatu yang tidak dapat diantisipasi yang diikuti oleh penyesuaian nilai tukar yang terlampau besar. Selanjutnya ada yang disebut dengan hubungan keuangan antara satu Negara dengan Negara lain. Hal ini didukung oleh teori regionalisme yang sarat akan efek domino."**

Hal itu sejalan dengan kondisi krisis yang melanda Eropa saat ini, dengan Yunani sebagai pemicunya, memberikan dampak yang membuat seluruh negara di kawasan tersebut turut mengalami krisis. Mau tidak mau Eropa harus bahu-membahu menangani krisis ini bersama-sama. Karena jika tidak, kredibilitas Eropa sebagai benua yang memiliki peradaban yang mapan, akan mengalami kehancuran.

Selain pengertian krisis yang disebutkan diatas, **Bernanke & Getler** dengan teori *Open Economy-nya* juga turut memaparkan krisis yang terjadi di Yunani dan Eropa saat ini. Keduanya menyampaikan bahwa :

**“Krisis akan tercipta apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik, kemudian ditambah dengan adanya krisis keuangan di Negara lain yang diduga oleh para investor akan terjadi juga di Negara lainnya, serta adanya manipulasi pasar oleh spekulan-spekulan besar, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar secara mendadak. Hal inilah yang menyebabkan kehancuran dalam neraca pembayaran sehingga mengakibatkan terjadinya krisis.”**

Teori tersebut juga dapat dikatakan tepat mengingat anggota ECB seperti Yunani yang melakukan kecurangan dalam proses administrasi saat negara tersebut mengajukan keanggotaan Uni Eropa. Ketika kecurangan tersebut diketahui public dan Uni Eropa sendiri, semuanya sudah terlambat, ketika Yunani sudah di dalam krisis karena kegagalan pasar dan pembangunan ekonomi domestiknya.

Teori-teori diatas penulis rasa tepat mewakili premis mayor pada penelitian ini, dan berikut teori-teori dan konsep-konsep yang mewakili premis minor, yaitu berupa teori-teori yang terikat dengan tema penelitian yang akan penulis bahas.

Perspektif dalam melihat ECB sebagai rezim sendiri digunakan dalam penelitian ini sebab keberadaan ECB bukanlah suatu organisasi perbankan yang mengutamakan fungsi-fungsi teknis saja dalam operasinya, melainkan keberadaan ECB sebagai institusi perbankan dibawah EU dan bagian dari integrasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik para pemangku kebijakan di Eropa baik dalam pembentukannya hingga operasinya. ECB muncul sebagai institusi perbankan yang menempatkan diri dalam struktur internasional dengan perannya yang membawahi 18 negara Euro, dimana hal ini membuat ECB diwarnai dengan berbagai perilaku negara yang didasari berbagai kepentingan. Keunikan ECB membuat ECB tidak bisa dianalisis sebagai organisasi formal biasa.

Selanjutnya penulis melihat ECB merupakan salah satu perwujudan dari teori OCA *Optimum Curency Area* pertama kali diperkenalkan oleh **Mundell dan Mc Kinnon** selama 1960s. pada dasarnya OCA ini adalah penyatuan mata uang dari beberapa negara, yang membawa konsekuensi terbentuk *fixed exchange* antar anggota dari OCA, dan berlakunya *floating exchange* pada anggota di luar OCA. Dengan struktur keuangan OCA tersebut diharapkan akan hilang unsur dari hambatan nilai tukar di Negara anggota.

Hal ini yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten dinegara anggota OCA, menumbuhkan spesialisasi produksi, sehingga dapat menyokong kehidupan ekonomi antar Negara anggota. Hal inilah yang diharapkan oleh **Mundell** menjadi dasar untuk mencapai pertumbuhan wilayah yang berkesinambungan yang diwujudkan dengan wilayah yang terintegrasi dalam satu mata uang.

Salah satu bentuk kebijakan moneter dari ECB adalah EMU merupakan perwujudan dari pasartunggal (*single market* ) dari negara-negara Eropa. Kebijakan perekonomian EMU terdiri dari tiga komponen, yaitu setiap negara anggota diharuskan untuk mengkoordinasikan setiap kebijakan perekonomian, menyediakan pengawasan multilateral atas koordinasi kebijakan perekonomian dan merupakan subyek dari ketetapan dan disiplinari finansial dan anggaran. Tujuan dari kebijakan moneter ECB adalah untuk menciptakan sebuah mata uang bersama dan untuk memastikan stabilitas mata uang.

Uni Eropa sebagai sebuah institusi regional berupaya untuk mencapai integrasi penuh memiliki beberapa kebijakan yang dirancang untuk memperkuat stabilitas ekonomi negara-negara anggota diantaranya kebijakan tentang kondisi moneter, suku bunga, serta sektor fiskal**. Dr Tsvetan Manchev** dalam tulisannya “*Economic and Monetary Union on the Horizon*” menjelaskan bahwa EMU merupakan sebuah integrasi komunitas diantara dua atau lebih negara anggota Uni Eropa yang mengimplementasikannya, dengan mengutamakan beberapa hal sebagai berikut (**Manchev dan Karavastev**, 2005, hal.7):[[21]](#footnote-21)

1. Penggunaan mata uang bersama (*common currency*) yang dikeluarkan oleh sebuah penerbit independen, yaitu Bank Sentral
2. Penerapan kebijakan moneter yang dilakukan oleh kesatuan bank sentral;
3. Pengimplementasian pasar bersama (*common market*) yang menampilkan pergerakan bebas manusia, barang, jasa dan modal, serta
4. Adanya kewajiban bagi negara-negara anggota untuk mengejar kebijakan ekonomi bersama *(common economic policies*) yang telah disepakati dalam sebuah kerangka perjanjian, seperti perjanjian tentang pertumbuhan dan kestabilan ekonomi atau yang dikenal dengan istilah *the Stability and* *Growth Pact*.

*Euro-zone* disebut juga dengan *Sistem Euro* (*Eurosystem*) atau Negara Euro (“Euroland”) merupakan kumpulan negara anggota Uni Eropa yang mengadopsi penggabungan mata uang Euro *(Euro Currency Union*). Dengan demikian negara tersebut menyerahkan kebijakan moneternya *(Monetary Policy*) kepada Bank Sentral Eropa di Frankfurt, Jerman. Sebelum disetujui untuk bergabung, calon negara anggota haru memenuhi kriteria konvergen *(Convergence Criteria).* Zona Euro resmi diluncurkan 1 January 1999, walau mata uangnya baru dicetak 1 Januari 2002.[[22]](#footnote-22)

Krisis ekonomi Eropa yang mulai merebak sejak 2010 sampai sekarang belum jelas kapan akan berakhir. Krisis ekonomi kawasan *Euro-zone* yang dipicu oleh besarnya utang pemerintah sebenarnya mulai mengakar sejak tahun 2000, dimana rasio utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa meningkat signifikan. Rasio utang Yunani yang pada tahun 2000 hanya sebesar 77% dari PDB nya, pada 2012 mencapai 170%, nilai ini diprediksi IMF akan tumbuh menjadi diatas 180% pada tahun 2013. Meningkatnya utang negara karena defisit anggaran yang terus berlanjut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan Maastricht Treaty, dimana dinyatakan dalam aturan ini bahwa utang negara tidak boleh lebih dari 60% dari PDB dan defisit maksimal 3% dari PDB. Teorinya, jika melewati angka itu, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi kawasan.[[23]](#footnote-23)

**1.6.2 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas maka penulis dapat menarik hipotesis bahwa:

**”jika ECB gagal dalam menjaga stabilitas finansial di kawasan *Euro-zone* maka akan berdampak pada negara-negara yang berada di kawasan Euro-zone”**

**Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Kegagalan ECB dalam menjaga stabilitas finansialVariabel Terikat:dampak pada negara- negara yang berada di kawasan Euro-zone  | 1. Instabilitas Finansial Euro-zone
2. Pelanggaran ketetapan Maastricht Treaty.
3. Krisis Ekonomi PIIGS ( Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, Spanyol)
 | Data:Adanya instabilitas finansial yang terjadi di ECB rentang tahun 2004-2010.( Lihat tabel 2.2)Sumber:*IMF Country Report 2004-2010*Data: * Adanya pelanggaran terhadap ketetapan Maastricht mengenai kondisi ekonomi yang sehat seperti Tingkat defisit Yunani selalu berada diatas angka 3% sebelum memasuki Euro-zone. Bahkan di 2009 angkanya menyentuh angka 14% terhadap PDB
* Rasio utang negara PIIGS melebihi angka 60% terhadap PDB

Sumber: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/07/01533853/Krisis.Zona.Euro.Guncang.Ekonomi.Globa> Data:* Adanya krisis yang terjadi di negara-negara PIIGS *( Portugal,Italy,Ireland,Greek,Spain)*
* rasio utang Yunani terhadap PDB mencapai 143%. Utangnya menumpuk sampai 328 miliar euro. Defisit pada tahun 2010 bahkan mencapai 10,5%.
* Rasio utang Portugal terhadap PDB pada 2010 mencapai 93% dengan utang menggunung sampai 195 miliar euro. Defisit anggarannya mencapai -9,1% terhadap PDB. Begitu juga dengan negara Italy, Spanyol dan Irlandia mengalami kondisi serupa.

Sumber: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/07/01533853/Krisis.Zona.Euro.Guncang.Ekonomi.Global> |

**1.1 Skema Kerangka Teoritis**

**Masstricht Treaty**

**ECB**

**Kegagalan ECB dalam menjaga stabilitas finansial**

**Instabilitas sistem keuangan/krisis**

* 1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis penelitian ini adalah tingkat analisa induksionis, yang eksplanasinya (Variabel bebas) yaitu kegagalan ECB dalam menjaga stabilitas finansial dengan berbagai pendekatan-pendekatannya terhadap unit analisis (Variabel terikat),yaitu dampaknya terhadap negara-negara yang berada di kawasan *Euro-zone*.

* + 1. **Metode Penelitian**

Untuk keperluan penelitian dan penganalisaan penulis menggunakan Metode Penelitian Deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan suatu kondisi dimana kebijakan penyatuan ekonomi dan moneter yang dibuat oleh ECB mengalami kegagalan dalam rangka pengimplementasiannya, sehingga kemudian kebijakan ini berpengaruh terhadap negara-negara yang berada dikawasan Euro-zone dan kemudian mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara yang berada di kawasan Uni Eropa pada umumnya.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research), yang mana peneliti berusaha untuk mencari data melalui pengamatan atau observasi tidak lansung dengan membaca buku, laporan (jurnal), surat kabar, website, dan artikel untuk memperoleh pengertian, pengetahuan dan data yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Dalam pengumpulan data dan segala bentuk informasi yang penulis butuhkan untuk digunakan sebagai data penelitian ini bertempat di lokasi sebagai berikut:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan (UNPAS) JL. Lengkong Besar No. 68, Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Parahyangan JL. Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141

**1.9.2 Lamanya Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2017.

* 1. **Skema Penulisan Sistematika Skripsi**

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Dimana disertakan juga tujuan dan kegunaan penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka teoritis dan hipotesis. Yang mana kedua kerangka tersebut dilengkapi dengan penjelasan akan operasionalisasi variabel dan indikator, asumsi-asumsi, metode penelitian, teknik pengumpilan data, waktu dan tempat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : Deskripsi mengenai kegagalan ECB sebagai bank sentral dikawasan Euro-zone.**

Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana ECB dijalankan dan bisa dikatakan dikatakan gagal dalam menjaga stabilitas finansial di kawasan Euro-zone, baik kegagalan dalam pembuatan kebijakan moneter, maupun dalam hal menjalankan dan menjaga kebijakan tersebut.

**BAB III : Deskripsi tentang Kebijakan ECB di negara-negara Euro-zone.**

Dalam bab ini akan di uraikan bagaimana kebijakan ECB ni negara-negara Euro-zon, dan bagaimana struktur di dalam ECB dan bentuk-bentuk dari kebijakan yang berlaku dalam ECB.

**BAB IV : Eksplanasi mengenai bagaimana kegagalan kebijakan dari ECB dan berdampak terhadap krisis yang tejadi negara-negara yang berada di kawasan Euro-zone.**

Dalam bab ini akan dibahas tentang beberapa faktor penyebab kegagalan ECB tersebut dan bagaimana kegagalan dalam kebijakan moneter tersebut mengakibatkan beberapa rentetan krisis yang terjadi di kawasan *Euro-zone.*

**BAB V : Penutup.**

Merupakan penutup dari penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan pembahasan.

1. A. Prasetyantoko, Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Oublik, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008) hal.15 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bank Indonesia, Booklet Stabilitas Sistem Keuangan, ( Jakarta: Bank Indonesia, 2007) [↑](#footnote-ref-2)
3. *Randy Charles Eping , A Beginer’s Guide to the World Economy,* (New York: Vintage Books, 1995), pp. 29-30 [↑](#footnote-ref-3)
4. *“ How Does the EU Works?”* , dalam <http://Europa.eu/abc/12lessons/lesson_4/index_en.htm> pada 3 januari 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Euro”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Euro> diakses 3 januari 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. *EMU is sometimes referenced as the "European Monetary Union"; however, the official name is the more inspecific "Economic and Monetary Union".* [↑](#footnote-ref-6)
7. “Perjanjian *Maastricht*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Maastricht> diakses 4 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Ekonomi_dan_Moneter_Uni_Eropa> diakses 4 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rainer Lenz, *Crisisnin the Euro-zone*: *Financial Management without Financial Policy, Presvective Column* dalam Friedrich Ebert Stiftung, June 2011 [↑](#footnote-ref-9)
10. Stergios Skaperdas , *Polcymaking in the Euro-zone and the Core VS Peripheral Problem*, CESifo Forum Vol.2/2011 [↑](#footnote-ref-10)
11. Stephen D. Krasner, 1993. *International Regimes*. New York: Cornel University Press , hal. 7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Martin Griffiths, Therry O’ Callaghan, dan steven C. Roach, *International Relation: The Key Concep*, (NY: Routledge, 2002) hal. 277 [↑](#footnote-ref-12)
13. Krasner *International Regimes*, 1983, hal. 15 [↑](#footnote-ref-13)
14. “Kebijakan Moneter ; Derfinisi dan Instrumen Kebijakan Moneter”, dalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/kebijakan-moneter-derfinisi-dan.html> diakses 6 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. “ Definisi Stabilitas Sistem Keuangan”, dalam <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx> diakses 6 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Walter S, Jones. 1993. Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2. (terjemahan) Jakarta : Gramedia Puataka Utama. Hal. 427. [↑](#footnote-ref-19)
20. ”PENGERTIAN DAN KONSEPSI REGIONALISME (Hubungan Internasional)”, dalam

 <https://teori-politik.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-regionalisme-hubungan.html> diakses 7 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://www.academia.edu/9332864/PENGARUH_SISTEM_INTEGRASI_EKONOMI_EURO_ZONE_UNI_EROPA_TERHADAP_KRISIS_EKONOMI_YUNANI_TAHUN_2009-2010> Diakses 7 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. “Kajian Eropa”, dalam [https://kajianEropa.wordpress.com/ekonomi/](https://kajianeropa.wordpress.com/ekonomi/) diakses 12 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-22)
23. **Sri Adiningsih dan Rosa Kristiadi “**Krisis Ekonomi Eropa: Terus Berlanjut”, dalam

[http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/krisis-ekonomi-Eropa-terus-berlanjut/](http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/krisis-ekonomi-eropa-terus-berlanjut/) diakses 13 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-23)